



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI BALI

UNIT KERJA : DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **I WAYAN SUNADA**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **XXXX**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 4.950.000.000**

1. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA TABANAN, HASIL SENDIRI
Rp. 600.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA
DENPASAR , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA
DENPASAR , HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/260 m2 di KAB / KOTA
TABANAN, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
5. Tanah Seluas 730 m2 di KAB / KOTA TABANAN, Rp. 700.000.000
6. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , HASIL
SENDIRI Rp. 1.200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 205.000.000**

1. MOBIL, HONDA HONDA HR-V RU1 1.5E CVT CKD / MINIBUS
Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. MOTOR, HONDA ACB2J21B02 A/T / SEPEDA MOTOR Tahun
2014, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 80.500.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 619.159.698**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ----**



Sub Total	Rp.	5.854.659.698
III. HUTANG	Rp.	155.692.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	5.698.967.698

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.